

Analysis of BPJS Employment Membership for Informal Sector Workers in Medan City (Case Study of BPJS Employment, North Medan Branch)

Analisis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Medan (Studi kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara)

Diana ¹⁾; Wahyu Syarvina ²⁾

^{1,2)} Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ dianamedan29@gmail.com; ²⁾ wahyusyarvina@uinsu.ac.id

How to Cite :

Diana., Syarvina, W. (2022). Analysis of BPJS Employment Membership for Informal Sector Workers in Medan City (Case Study of BPJS Employment, North Medan Branch). Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [30 Maret 2022]

Revised [3 April 2022]

Accepted [9 April 2022]

KEYWORDS

Social security participation,

Informal workers, BPJS

Employment marketing strategy

*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*



ABSTRAK

Setiap tenaga kerja memiliki hak perlindungan keselamatan kerja baik pekerja formal maupun informal, dapat dibayangkan jika para pekerja tidak memiliki jaminan sosial dan hal tersebut berpengaruh pada melemah perlindungan terhadap pekerja dan kinerja karyawan yang buruk pastinya. Maka dari pemerintah harus memperbaiki dan meningkatkan jaminan sosial bagi tenaga kerja bukan penerima upah, karena masih banyak pekerja informal yang tidak menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang memiliki tanggung jawab kepada presiden dan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh pekerja Indonesia dan termasuk imigran yang bekerja di Indonesia selama 6 bulan kerja. Bagaimana jika masih ada para pekerja informal yang tidak ikutserta dalam program tersebut maka bisa dikatakan para pekerja di Indonesia belum sepenuhnya sejahtera. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih rendah di kota Medan dan bagaimana BPJS ketenagakerjaan meningkatkan kepesertaan bagi para pekerja sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menampilkan gambaran dari permasalahan ini.

ABSTRACT

Every worker has the right to work safety protection for both formal and informal workers, it is conceivable if the workers do not have social security and this has an effect on weakening protection for workers and for sure poor employee performance. So the government must improve and increase social security for non-wage workers, because there are still many informal workers who do not use BPJS Employment. As we know BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity that has responsibility to the president and has the function to organize programs Work Accident Insurance (JKK), Death Security (JKM), Old Age Security (JHT) and Pension Security (JP) for all Indonesian workers and including immigrants who work in Indonesia for 6 months of work. What if there are informal workers who do not participate in the program, it can be said that workers in Indonesia are not yet fully prosperous. The purpose of this study is to find out why

BPJS Employment participation is still low in the city of Medan and how BPJS Employment increases participation for informal sector workers . This study uses a qualitative method by presenting an overview of this problem.

PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan untuk dapat menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat luas. Tenaga kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja yang terikat dengan instansi pemerintah atau non pemerintah disebut dengan pekerja formal dan tenaga kerja yang tidak terikat instansi atau buruh harian lepas atau sejenisnya disebut informal. Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan, perlindungan upah dan jaminan sosial kepada pekerja untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan kesejahteraan.

Pada tahun 2015 BPJS Ketenagakerjaan memperkenalkan kepesertaan bukan penerima upah, dengan adanya program ini pekerja informal dapat mengajukan jaminan perlindungan kerja di BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan fasilitas yang sama dengan pekerja formal, namun dalam proses pembayaran iuran para pekerja informal dapat dilakukan secara mandiri, berbeda halnya dengan para pekerja formal yang pembayaran iurannya akan dipotongkan dari gaji pekerja dan ditambah iuran dari perusahaan di tempat pekerja yang bersangkutan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan beberapa program yaitu

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program yang memberikan perlindungan bagi pekerja atas risiko pekerjaan yang terjadi dalam hubungan kerja
2. Jaminan Kematian (JKM) merupakan santunan kematian bukan karena kecelakaan kerja yang diberikan kepada ahli waris untuk keperluan biaya pemakaman.
3. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan tabungan hari tua yang didapat dari iuran perusahaan yang dapat diambil jika terjadi pemberhentian kerja, kecelakaan kerja, dan sebab lainnya.
4. Jaminan Pensiun (JP) adalah jaminan yang diberikan bagi karyawan yang usianya tidak termasuk usia kerja lagi yang mana jaminan memiliki tujuan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi karyawan yang sudah habis masa kerjanya.

Sedangkan bagi para pekerja wirausaha, freelancer dan buruh BPJS Ketenagakerjaan memiliki program BPU dan besaran iuran dan santunannya antara lain :

1. Jaminan Kematian (JKM) dengan mengikuti program ini peserta harus berkontribusi sebesar Rp. 6.000 dan akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 21.000.000
2. Jaminan Hari Tua (JHT) dengan program ini peserta dapat menabung di BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 40.000, saldo dari tabungan dapat dicairkan jika peserta sudah tidak bekerja lagi.
3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program yang diberikan jika peserta mengalami kecelakaan kerja dan mendapat santunan sebesar Rp. 96.000.000 dengan membayar iuran sebesar Rp. 20.000 setiap bulannya.

Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki perlindungan kerja yang pasti untuk mencapai kesejahteraan melalui program BPU. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara tercatat bahwa pada bulan desember 2021 terdapat 12.70,000 tenaga kerja aktif pada sektor informal dan pada bulan maret 2022 terdapat 8.679,000 tenaga kerja aktif pada sektor informal. (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara 2022).

Dari fenomena diatas peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu mengapa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih rendah untuk sektor informal di kota medan ? Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara meningkatkan promosi pemasaran untuk meningkatkan kepesertaan bagi sektor informal ?

LANDASAN TEORI

Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan suatu badan pemerintah yang menyelenggarakan program sosial untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat tanpa sumber daya. Pada dasarnya program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya. (Nancy Agitha, 2016). Menurut ILO Convention no 102 jaminan sosial merupakan sebuah perlindungan dari oleh rayat dan untuk rakyat dengan kebijakan publik terhadap perekonomian dan sosial yang di akibatkan oleh hilangnya sebagian atau seluruh pendapatan akibat berbagai risiko. Sebagai pelayanan sosial publik maka tentunya harus dijalankan dengan baik agar setiap masyarakat mendapatkan perlindungan sosial maka dari itu Negara harus menjamin adanya sebuah perlindungan baik pendapatan maupun pemeliharaan untuk kebutuhan hidup tenaga kerja. (Suharto, 2009:16)

BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama PT Jamsostek (Persero), BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan bagi tenaga kerja dan hidup lebih baik bagi keluarganya.

Pekerja Informal

Tenaga kerja informal adalah tenaga kerja yang melakukan usaha ekonomi baik individu untuk mendapatkan penghasilan dari kegiatan dan ataupun usahanya. (Rekha Yulia, 2017).

Tenaga kerja informal merupakan bagian dari angkatan kerja yang pada umumnya nya tidak memiliki ikatan antara tenaga kerja dan suatu instansi pemerintah ataupun non pemerintah. Sektor informal adalah usaha sendiri atau wirausaha dengan jenis kesempatan kerja yang kurang teratur, padat karya, dan tidak memiliki kemampuan khusus. Sektor informal dapat dilakukan oleh siapapun tanpa melihat dari tingkat pendidikan. Sektor informal merupakan sebuah sektor kegiatan ekonomi kecil-kecilan yang mempunyai ciri-ciri sepepenerimaannya

- a. Memiliki bentuk kegiatan yang tidak terorganisir.
- b. Tidak ikut dengan peraturan pemerintah
- c. Memiliki modal yang kecil dan memiliki pendapatann yang tidak tentu, dasar perhitungan juga harian dan memiliki tempat usahanya tidak selamanya.
- d. Tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan besar dan hanya melayani masyarkat dalam cakupan yang kecil.
- e. Tenaga kerja yang digunakann tidak memiliki keterampilan yang khusus.
- f. Tidak menggunakan sistem perbankan, pembukuan dan lainnya dan setiap usaha yang mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dan berasal dari lingkungan keluarga kenalan. (Wirosardjono (Dalam ,Budi 2006:33).

Organisasi

Organisasi merupakan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. (Chester I. Bannard). Dimock memberikan pengertian organisassi adalah percampuran ide yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dan membentuk sebuah kesatuan.

Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah hasil dari pencapaian sebuah tujuan yang ditetapkan dari awa, sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (Sudarmanto, 2014) adalah prestas kerja, pelaksanaan kerja, hasil kerja yang diterjemahkan dari performance.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif yang mana temuan tidak melalui prosedur statistic atau bentuk perhitungan lainnya, namun metode kualitatif yang memaparkan data-data hasil

penelitian juga menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Angkatan Kerja dan Pekerja Informal

Hasil *survey* Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebesar 32,05 juta dalam kurun waktu 2010-2020. Populasi penduduk Indonesia pernah sampai 270,02 juta jiwa pada bulan September 2020 dengan gerak pertumbuhan penduduk rata-rata 1,25 persen per tahun. Pulau Sumatera merupakan Sebaran penduduk dengan peringkat kedua setelah pulau Jawa, jumlah persebaran penduduk sebesar 58,56 juta jiwa. Dari hasil sensus penduduk tahun 2020, mencatat mayoritas penduduk di Indonesia lahir pada tahun (1997-2012) atau disebut dengan generasi Z sedangkan untuk zaman milenial lahir pada tahun (1981-1996). Indonesia memiliki persentase penduduk usia produktif 27,94 persen.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki jumlah pekerja informal yang besar daripada pekerja formal. Sebagian besar pekerja informal lebih banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, Mayoritas dari pekerja informal memiliki pendidikan yang rendah karena minimnya pengetahuan menyebabkan kurangnya kesadaran para pekerja informal akan perlindungan sosial. Angkatan kerja dapat didefinisikan penduduk yang memiliki usia produktif. Pekerja merupakan orang yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan gaji atau upah dari hasil kerjanya. Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 70,79 persen dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Berdasarkan data BPS kota pada tahun 2020 penduduk kota medan mencapai 2.435.525 jiwa dengan angkatan kerja sebesar 1.120.160 jiwa. Pekerja di bagi menjadi dua yaitu pekerja penerima upah (Pekerja formal) seperti Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pemerintah juga Pegawai swasta dan pekerja bukan penerima upah (pekerja informal), pekerja yang dikatakan informal adalah pekerja yang tidak memiliki gaji tetap seperti petani, pedagang, nelayan dan lain-lain. Dengan demikian pekerja informal juga berhak akan sebuah jaminan sosial untuk perlindungan akan keselamatan kerja, penyelenggara akan jaminan sosial kesejahteraan di Indonesia diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki program asuransi kepada para pekerja formal maupun informal atas risiko kerja.

Kepesertaan Jaminan Sosial pada sektor informal dan Strategi BPJS Ketenagakerjaan memperluas kepesertaan pada sektor informal

BPJS Ketenagakerjaan memiliki cakupan yang besar bagi pekerja sektor informal seperti : GN LINGKARAN; PERISAL; dan Desa, pasar dan Mall Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini diharapkan untuk menarik para pekerja informal ke jaminan sosial namun 90 persen pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program yang di selenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan itu para pekerja Informal masih banyak yang tidak mendapatkan perlindungan dibawah standar minimum jaminan sosial sesuai dengan konvensi ILO seperti perawatan medis, biaya saat sakit, biaya kebutuhan saat pengangguran, biaya hari tua, biaya kecelakaan kerja, biaya hari tua, biaya keluarga, biaya kehamilan, biaya cacat dan biaya pewaris.

Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2018 di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yaitu 5.223 perusahaan dengan total tenaga kerja pada program PU sebesar 112.579 tenaga kerja dan pada sektor BPU sebesar 6.676. Sedangkan pada sektor jasa konstruksi terdapat 37.032 tenaga kerja yang di lindungi. Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja sektor informal mengalami kenaikan yaitu terdapat 12.70.000 tenaga kerja aktif yang di cakup BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada tahun 2022 saat ini peserta BPU mengalami penurunan yaitu jumlahnya terdapat 8.679.000 tenaga kerja aktif yang dicakup BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara 2022).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerja informal tidak di cakup oleh BPJS Ketenagakerjaan. Faktor pertama yaitu umumnya pekerja informal memiliki ekonomi yang rendah

hal ini dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam membayar kontribusi dari program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Faktor kedua para pekerja informal pastinya akan lebih mengutamakan kebutuhan yang utama seperti, kebutuhan pokok, tempat tinggal, pendidikan anak dan keperluan lain-lain. Faktor ketiga penghasilan yang tidak tentu menyebabkan para pekerja informal sulit untuk membayar uang kontribusi setiap bulannya. Dan faktor lainnya adalah kurangnya informasi tentang manfaat jaminan sosial, hal ini lah yang membuat para pekerja informal menganggap tidak terlalu pentingnya jaminan sosial bagi dirinya.

Adapun usaha yang di lakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara dalam mensosialisasikan program yang diselenggarakan yaitu dengan langsung melakukan penyuluhan, Informasi langsung dari petugas masyarakat, Website dan Billboard. Namun karena dampak dari Covid-19 ini upaya meningkatkan kepesertaan BPU terhambat oleh tidak adanya kontak fisik untuk mendukung proses sosialisasi maupun aukisisi kepesertaan secara langsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah badan hukum yang bergerak pada jaminan sosial ,BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program yaitu JHT,JKK,JP, dan JKM untuk mensejahterakan para tenaga kerja Indonesia. Pada tahun 2022 saat ini peserta BPU terdapat 8.679,000 tenaga kerja aktif yang dicakup BPJS Ketenagakerjaan cabang medan utara tentunya ini masih sangat rendah dari jumlah angkatan kerja yang ada di kota medan. Faktor penyebab rendahnya kepesertaan BPU adalah taraf penghasilan ekonomi yang rendah, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, kebutuhan pendidikan, hal ini yang menyebabkan para pekerja informal tidak menganggap betapa pentingnya jaminan sosial dan faktor terakhir adalah kurangnya informasi terkait jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan cabang medan Utara melakukan sosialisasi yaitu dengan penyuluhan langsung terhadap masyarakat, bekerjasama dengan petugas masyarakat dalam menginformasikan Program BPJS Ketenagakerjaan, Dengan menyediakan media website, dan Billboard. Namun dampak dari Covid-19 menyebabkan BPJS Ketenagakerjaan terhambat dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Shabrina. 2018. "Strategi Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Nasional Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dalam Mensosialisasikan Kepesertaan Bukan Penerima Upah (Supir Angkot dan Tukang Becak)". Skripsi. Medan: Universitas Medan Area
- Armila Ernisa Zulfa. "Analisis Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal.
- Arum Ardianingsih, dkk. 2021. "Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Pekalongan". Jurnal Litbang Kota Pekalongan. Vol. 21, hlm 64-71
- Badan Pusat Statistik. 2020. "Sensus Kependudukan". www.bps.go.id
- BPS Kota Medan. 2020. <https://medankota.bps.go.id>
- Fajar Baskoro. 2021. "Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Bukan Penerima Upah pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo". Skripsi. Ponorogo. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Masayu Silvia Fitrianti. 2020. "Memperluas Cakupan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal: Belajar dari Grameen Pension Scheme Bangladesh dan Program Alkansaayah Filipina. Jurnal Institute BPJS Ketenagakerjaan. Vol 5, No 1
- Rekha Yulia. 2017. "Respon Pekerja Sektor Informal terhadap Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah di Kecamatan Medan Baru Kota Medan". Skripsi. Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara
- Riana Tambunan. 2020. "Upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Hari Tua Kepada Pekerja Informal di Kota Medan". Medan. Universitas Negeri Medan

Sri Nurfiaty Jufri. 2018. "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar". Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar